



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk:
- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2026;
 - b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang profesional dalam melayani publik, netral dan sesuai nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Manajemen Perubahan	Perencanaan Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim RB dilingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Terbitnya SK Tim RB di lingkungan Unit / Satuan Kerja													Rendatin
			Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Terlaksananya kegiatan pembangunan komitmen bersama di KPU Kabupaten Karanganyar													Rendatin
			Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan KPU Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan KPU Kabupaten Karanganyar													Rendatin

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pelaksanaan manajemen perubahan	Sosialisasi RB melalui Media Informasi KPU Kabupaten Karanganyar	Tersedianya media sosialisasi RB di KPU Kabupaten Karanganyar yang bisa diakses													Rendatin
			Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	Terminimalisasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran disiplin ASN													Parmas dan SDM
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Melakukan monitoring pelaksanaan rencana Aksi RB dan rencana aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan													Rendatin
			Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui lembar kerja evaluasi unit (penilaian mandiri pelaksanaan RB di lingkungan kerja)	Tersedianya dokumen tindaklanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja													Rendatin
				Terisinya lembar kerja evaluasi (LKE) Unit													Rendatin
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan Deregulasi Kebijakan	Penguatan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	Mengikuti kegiatan bimtek, pelatihan, raker/rakor dan evaluasi	Tersedianya kapasitas personil Tim Teknis Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum													Teknis dan Hukum
			Bedah/kajian regulasi kepemiluan	Meningkatnya wawasan dan													Teknis dan Hukum

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				pengetahuan terkait regulasi kepemiluan													
		Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	Peningkatan pengelolaan website JDIH	Terwujudnya peningkatan keterbukaan informasi di bidang hukum melalui publikasi dokumen produk hukum pada laman JDIH													Teknis dan Hukum
			Peningkatan pengelolaan media sosial JDIH	Terpublikasinya kegiatan dan informasi JDIH melalui media sosial													
		Penyusunan, penetapan dan Pengesahan dokumen produk hukum	Menyusun Prosedur Standar Operasional penyusunan, penetapan dan pengesahan dokumen produk hukum	Tersusunnya penetapan dan pengesahan dokumen produk hukum dilaksanakan sesuai ketentuan													Teknis dan Hukum
			Inventarisasi kebutuhan produk hukum tahapan Pemilu dan Pemilihan	Tersusunnya rekapitulasi daftar produk hukum tahapan Pemilu dan Pemilihan													
		Dokumentasi dan penataan arsip produk hukum	Administrasi dokumen arsip produk hukum	Tersusunnya daftar berkas dan daftar isi berkas arsip Hukum													Teknis dan Hukum
			Pelaksanaan tata kelola arsip produk hukum	Terlaksananya Sistem pengelolaan dan penataan arsip produk hukum sesuai													

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				kaidah kearsipkan													
			Penyimpanan dan penataan dokumen koleksi produk hukum	Tersedianya penataan koleksi produk hukum di ruang JDIH dan perpustakaan KPU Karanganyar													Teknis dan Hukum
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Evaluasi Organisasi	FGD Evaluasi Organisasi di Lingkungan unit/satuan kerja	Terdokumentasinya laporan FGD Evaluasi Organisasi;													Parmas dan SDM
			Pengisian Kuisisioner Evaluasi Organisasi	Terisiny Pelaporan Kuisisioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI dan Kemenpan RB													Parmas dan SDM
		Penyesuaian SOTK	Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat.	Terlaksananya SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat													Parmas dan SDM
			Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja	Tersedianya struktur Organisasi unit/Satuan Kerja													Parmas dan SDM
4	Penataan Tatalaksana	Peningkatan tata laksana proses bisnis serta <i>Standart Operational Procedure</i> (SOP) di Lingkungan KPU	Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya SOP terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku													Parmas dan SDM

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Kabupaten Karanganyar		Tersedianya SOP yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja													Parmas dan SDM
				Terlaksananya SOP yang telah diterapkan dan dipahami seluruh pegawai													
			Evaluasi terhadap proses bisnis dan SOP secara berkala	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan SOP untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi													Parmas dan SDM
		Penyelenggara an Keterbukaan Informasi Publik	Melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas tim PPID KPU Kabupaten Karanganyar	Tersedianya penetapan struktur PPID KPU Kabupaten Karanganyar													Parmas dan SDM
				Tersedianya jadwal petugas PPID setiap hari kerja													Parmas dan SDM
				Tersedianya Pemenuhan permohonan informasi publik secara cepat dan tepat													Parmas dan SDM

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pengelolaan PPID dan E-PPID di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya Daftar Informasi Publik (DIP) yang diperbaharui setiap tahun dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar													Parmas dan SDM
				Updating website E-PPID dan dapat diaksesnya Informasi Publik sesuai DIP maupun permohonan informasi melalui website E-PPID													Parmas dan SDM
				Tersedianya laporan pelaksanaan PPID KPU Kabupaten Karanganyar													Parmas dan SDM
		Tata kelola implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Survei kepuasan pemohonan informasi	Tersedianya Indeks kepuasan pemohon informasi													
				Menerapkan teknologi informasi berupa pemanfaat aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan													Rendatin Teknis dan hukum Parmas dan SDM KUL

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				SIDALIHJUT, SIMPAW, SIADKA, SIRUP, LPSE													
			Menerapkan teknologi informasi berupa pemanfaatan aplikasi SPBE dalam pelayanan publik	Teraksesnya Formulir Online Pengaduan Masyarakat oleh publik													Parmas dan SDM
				Tersedianya Website E-PPID dan JDIH KPU Kabupaten Karanganyar yang selalu diperbaharui													Parmas dan SDM Teknis dan Hukum
				Tersedianya kemanfaatan website SIDATAN oleh masyarakat guna mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat													Rendatin
	Penerapan sistem kearsiapan yang handal		Pengelolaan arsip kepemiluan maupun arsip keuangan dan kepegawaian di KPU Kabupaten Karanganyar	Terklasifikasinya serta tertatanya arsip kepemiluan dan non kepemiluan baik arsip statis maupun dinamis secara manual dan digital													KUL
			Kerjasama dengan dinas/instansi dalam pengelolaan arsip di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Terjalinnnya kerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penataan dan penyimpanan arsip													KUL Rendatin

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	Pembangunan Sistem Merit	Penerapan Pengukuran Kinerja individu	Tersedianya Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai													Parmas dan SDM
				Tersedianya Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)													Parmas dan SDM
				Tersedianya Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ <i>Cascading</i>													Parmas dan SDM
				Tersedianya Pengukuran periodik sasaran kinerja individu													Parmas dan SDM
				Terlaksananya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP													Parmas dan SDM
				Tersedianya Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian													Parmas dan SDM

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				<i>reward and punishment</i>													
			Penerapan <i>assessment</i> untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	Tersedianya Data Mutasi													Parmas dan SDM
				Tersedianya Data Promosi													Parmas dan SDM
				Tersedianya Data Peserta Assessment													Parmas dan SDM
			Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Tersedianya Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya													Parmas dan SDM
				Tersedianya Jumlah Pelanggaran tahun ini													Parmas dan SDM
				Tersedianya Jumlah Pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukum													Parmas dan SDM
			Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja													Parmas dan SDM Rendatin
			Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Tersedianya identifikasi kebutuhan Kompetensi di Lingkungan unit kerja													Parmas dan SDM
				Tersedianya Jumlah pegawai yang mengikuti pengem-													Parmas dan SDM

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				bangan Kompetensi													
			Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Tersedianya setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan													Parmas dan SDM
			Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Data kepegawaian yang mutakhir di Lingkungan unit/satuan kerja													Parmas dan SDM
		Profesionalisme ASN	Pengembangan Jabatan Fungsional di Lingkungan unit/satuan kerja	Tersedianya Jumlah dan Jenis Jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja													Parmas dan SDM
6	Penguatan Akuntabilitas	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar	Penyusunan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya dan ditandatangani perjanjian kinerja oleh Ketua dan Pejabat Struktural KPU Kabupaten Karanganyar													Rendatin
			Menyusun dokumen perencanaan anggaran Satker KPU Kabupaten Karanganyar	Tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, DIPA/RKAKL dan Indikator Kinerja Utama													Rendatin
			Menyusun Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU dan Sekretariat KPU													Rendatin

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar yang tepat waktu dan sesuai petunjuk teknis													
			Melaksanakan Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien	Tersusunnya matriks rencana kerja setiap bulan													Rendatin
				Terlaksananya revisi anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan													Rendatin
			Melakukan pemantauan, pengukuran capaian kinerja secara berkala	Terlaksanya Pengukuran Persentase capaian output kinerja setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap triwulan													Rendatin
			Evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan anggaran	Terlaksananya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran secara berkala													Rendatin
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Karanganyar	Pemutakhiran dan pengisian data kinerja di aplikasi pelaporan kinerja	Terisinya data persentase capaian kinerja dan laporan kinerja di aplikasi SMART DJA dan E-Monev Bappenas													Rendatin

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pelatihan SDM pengelola akuntabilitas kinerja antara lain Pengelola Keuangan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Perencanaan	Terlaksananya Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan akuntabilitas kinerja													Parmas dan SDM
7	Penguatan Pengawasan	Penerapan Sistem Pengendalian Internal	Fasilitasi penyusunan dan pelaporan Kartu Kendali SPIP dan kelengkapannya setiap bulan	Tersusunnya Laporan Kartu Kendali SPIP setiap bulan tepat waktu dan lengkap													Teknis dan Hukum
			Melaksanakan tahap penilaian risiko dan analisis risiko	Tersusunnya tabel uraian risiko/potensi risiko													Teknis dan Hukum
			Menyusun Laporan Tahunan Penyelenggaraan SPIP	Tersusunnya Laporan Tahunan Penyelenggaraan SPIP sesuai Juknis yang ditetapkan KPU													Teknis dan Hukum
		Pengendalian Gratifikasi	Sosialisasi regulasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi	Terlaksananya Pemahaman internal pelaksanaan pengendalian gratifikasi													Parmas dan SDM
			Penanganan laporan	Terlaksananya Prosedur penanganan													Parmas dan SDM

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			gratifikasi	gratifikasi sesuai ketentuan													
		Pengawasan Internal	Menyusun kebijakan pengawasan internal	Tersusunnya mekanisme pengawasan internal													Teknis dan Hukum
		Pembangunan zona integritas	Pencanangan zona integritas	Terbentuknya tim zona integritas													Teknis dan Hukum
			Penyusunan rencana aksi zona integritas	Tersusunnya Penandatanganan pakta integritas													Rendatin
				Adanya rencana aksi zona integritas													Teknis dan Hukum
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan pelayanan publik yang prima	Memetakan jenis-jenis produk pelayanan publik	Terpetakannya Informasi jenis-jenis produk pelayanan publik													Parmas dan SDM
		Mendorong inovasi pelayanan publik KPU Kabupaten Karanganyar	menerapkan inovasi dan mendorong pelayanan publik yang baik	Terlaksananya penerapan Indeks kepuasan pelayan publik KPU Kabupaten Karanganyar													Parmas dan SDM

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator keberhasilan	Pelaksanaan (bulan)												Penanggung Jawab
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		membangun zona pelayanan publik	membangun dan menerapkan variabel dan indikator zona pelayanan publik	Tersedianya Prosedur Standar Operasional (PSO) Pelayanan Publik KPU Kabupaten Karanganyar													Parmas dan SDM

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 18 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eko Handoko